



# **NASKAH REKOMENDASI KEBIJAKAN DALAM PEMBERITAAN KEBERAGAMAN PADA MEDIA KONVERGEN**

**Fakultas Ilmu Komunikasi  
Universitas Tarumanagara**

**Disusun Oleh:  
Dr. Riris Loisa, M.Si.  
G.Genep Sukendro, S.Sos., M.Si.  
Drs. Muhamad Gafar Yoedtadi, M.Si.  
Roswita Oktaviani, S.Sos., M.Si.  
Lusia Savitri Setyo Utami, S.Sos., M.Si.**

## **Kata Pengantar**

Naskah rekomendasi kebijakan dalam Pemberitaan Keberagaman Pada Media Konvergen merupakan salah satu luaran penelitian yang dilakukan oleh tim dosen di Universitas Tarumanagara. Penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) tahun berdasarkan hibah Kemenritek BRIN, pada tahun 2019 dan 2020.

Penelitian dilakukan 2 (dua) tahap, tahap pertama melalui analisis isi pada pemberitaan keberagaman di dalam akun YouTube, yang merupakan akun resmi dari 2 (dua) media berita siber yang masuk dalam kategori paling banyak diakses berdasarkan pemeringkatan Alexa.com. Tahap kedua dilakukan dalam bentuk penelitian lapangan, baik berupa wawancara mendalam dengan para jurnalis kontributor berita keberagaman khususnya yang berada di wilayah pasca konflik, organisasi jurnalis di daerah dan dengan Komisi Penyiaran Daerah. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan Dewan Persa dan FGD dengan tim redaksi yang ada di Jakarta.

Naskah rekomendasi kebijakan ini diharapkan dapat memberi masukan dalam pemberitaan mengenai keberagaman di media konvergen yang sedang berkembang dan masih akan terus berubah. Selain itu, rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam membangun kehidupan keberagaman masyarakat melalui pemberitaan yang memadai.

Tim Peneliti

## Daftar Isi

Kata Pengantar	.....	i
Daftar Isi	.....	1
1. Latar Belakang	.....	2
2. Rendahnya Produksi Berita Keberagaman	.....	3
3. Memori Kolektif Jurnalis di Wilayah Pasca Konflik	.....	4
4. Ketimpangan Relasi Jurnalis Daerah dengan Redaksi di Jakarta	.....	6
5. Relasi Jurnalis dan Masyarakat di Wilayah Pasca Konflik	.....	6
6. Dampak Luas Media Sosial	.....	7
7. Rekomendasi	.....	8
Daftar Pustaka	.....	10

## 1. Latar Belakang

Isu keberagaman merupakan persoalan penting untuk dikaji. Kondisi masyarakat Indonesia yang multikultur membutuhkan situasi yang kondusif agar terjadi harmoni dalam kehidupan bersama. Kemajemukan dalam banyak hal – suku, ras, agama, golongan, seharusnya menjadi khazanah atau modal untuk membangun masyarakat yang maju, namun sering kali dijadikan alat pemecah belah. Media massa memegang peran penting dalam menyebarkan pemahaman nilai-nilai keberagaman. McQuail (2011) memaparkan empat fungsi media massa di masyarakat, yakni sebagai medium pengawasan, sosialisasi, transformasi dan hiburan. Media masa dapat menjadi medium untuk sosialisasi nilai-nilai keberagaman. Namun, media massa kurang memberikan perhatian terhadap isu keberagaman. Hal itu agaknya lebih disebabkan sikap kehati-hatian dan kekhawatiran pemberitaan akan memicu eskalasi persoalan menjadi lebih luas. Penelitian Loisa, Susanto, Junaidi, Loekman (2019) menunjukkan bahwa penyebab kurangnya isu keberagaman menjadi pilihan topik pemberitaan disebabkan kekhawatiran dampak pemberitaan berisiko memperkeruh situasi. Akibatnya, dalam memberitakan isu keberagaman media kerap kali bersikap tidak independen dengan lebih banyak mengutip narasumber utama dari sisi aparat pemerintah.

Keengganan media massa memberikan porsi pemberitaan terhadap peristiwa atau permasalahan seputar isu keberagaman boleh jadi memiliki beragam alasan, pertama isu keberagaman kurang menarik dari sisi komersial, kedua, isu keberagaman mengandung risiko menimbulkan kericuhan di masyarakat. Ketiga, ada memori kolektif yang tersisa dalam ingatan para jurnalis terutama di wilayah pasca konflik, yang menyebabkan mereka menghindari pemberitaan yang menonjolkan perbedaan. Keempat, posisi jurnalis di daerah dan pusat belum memiliki relasi yang adil (fair). Kelima, pertimbangan hubungan antara masyarakat dengan jurnalis di wilayah pasca konflik yang harus terjaga dengan baik. Padahal dalam isu keberagaman peran media massa sangat ditunggu sebagai otoritas kebenaran faktual dan institusi verifikasi resmi terhadap berbagai informasi yang kini sangat berlimpah.

Situasi pasca reformasi memberi kebebasan dalam praktik bermedia dan menyebabkan jumlah media yang lahir meningkat tajam. Namun penambahan jumlah media ternyata tidak disertai kemampuan bermedia yang baik. Pelanggaran

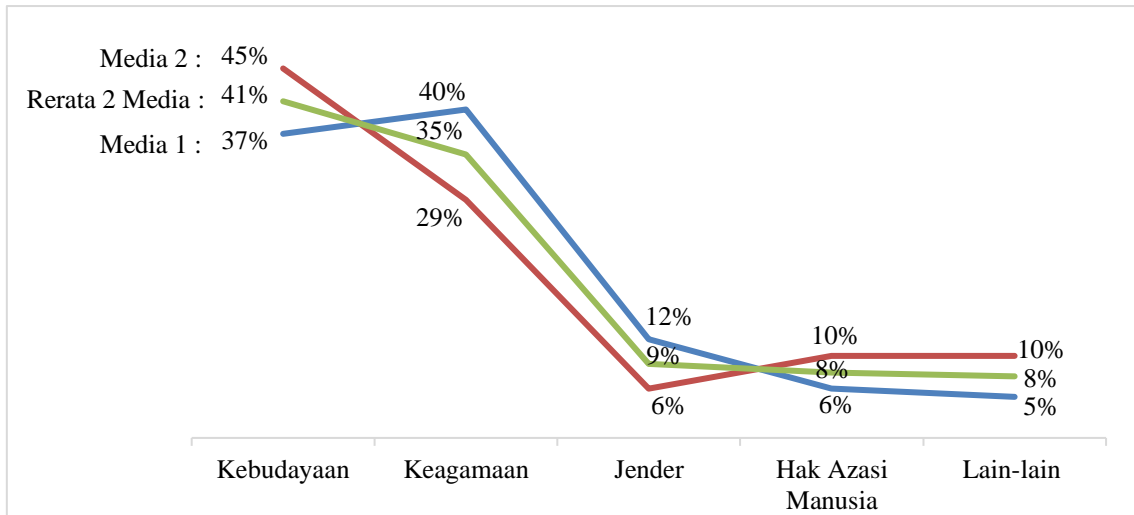
regulasi dan etika oleh media kerap terjadi. Pada 2018 Dewan Pers menerima 600 surat pengaduan dari masyarakat terhadap media massa. Jumlah tersebut tergolong tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN yang hanya 20 pengaduan per tahun (Tempo.co, 2018). Jumlah pengaduan yang meningkat bisa jadi didorong juga oleh perubahan sistem politik pasca reformasi yang memberikan otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan. Hal itu mendorong lahirnya semangat kedaerahan, etnis dan ekspresi keagamaan yang tinggi di daerah yang tercermin dari meningkatnya ekspresi-ekspresi bersifat SARA oleh media-media lokal (Junaidi, 2017).

Persoalan media nir-etika tersebut masih ditambah dengan kian mudahnya masyarakat memiliki medianya sendiri. Dengan teknologi internet 2.0, masyarakat dapat berperan sebagai produsen media dengan memanfaatkan media sosial. Siapapun dapat menjadi produsen konten atau disebut sebagai *user generated content* (Hartanti, 2018). Sementara di media sosial tak semua orang paham regulasi dan etika, serta menyadari bahayanya memproduksi konten-konten yang negatif, seperti menyebarkan rasa permusuhan, ujaran kebencian, prasangka SARA dan fitnah (hoax). Berdasarkan survei yang dilakukan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) pada 7-9 Februari 2017 terhadap 1.116 responden di Indonesia, sebanyak 44,33 persen masyarakat menyatakan menerima berita hoaks setiap hari dan 17,2 persen menerima lebih dari satu kali (Juditha, 2018). Sepanjang tahun 2016 Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya memblokir 300 lebih akun media sosial dan media *online* yang menyebarkan konten hoax, provokasi dan SARA, serta 800 ribu akun terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian (Septanto, 2018).

## **2. Rendahnya Produksi Berita Keberagaman**

Dari hasil analisis isi yang dilakukan dalam penelitian ini, terlihat bahwa berita keberagaman dari 2 wilayah pasca konflik (Ambon dan Aceh) sangat rendah: berita keberagaman mengenai Aceh hanya terdapat 3 berita, dengan rincian 2 berita di media 1 dan 1 berita di media 2. Sedangkan berita keberagaman dari Ambon hanya ada 2 berita di media 1. Hal ini cukup mengejutkan mengingat bahwa kedua kota tersebut pernah menjadi pusat pemberitaan berbagai media massa selama kurun waktu yang cukup panjang.

Di samping itu, dari hasil analisis isi muncul beberapa kategori isu keberagaman, dengan persentase tertinggi adalah pemberitaan mengenai kebudayaan, seperti mengenai adat, suku, dsb.



Grafik 1. Kategori Isu Keberagaman pada Dua Akun Resmi Media Berita dalam Situs Youtube

Pada kedua media, rerata porsi berita mengenai kebudayaan porsi sebesar 41%, pemberitaan kebudayaan pada media 1 mencapai sebesar 37%, sementara di media kedua sebesar 45%. Isu kedua tertinggi adalah pemberitaan tentang keagamaan, dengan rerata pemberitaannya pada kedua sebesar 35%, dengan rincian pemberitaan pada media 1 sebesar 40%, sementara pada media 2 sebesar 29%. Isu ketiga tertinggi adalah pada pemberitaan mengenai isu jender, dengan rerata nilai sebesar 9%, dengan rincian 12% pada media 1, dan 6% pada media 2. Selebihnya adalah pemberitaan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dan isu lain-lain, masing-masing dengan rerata 8%. Isu HAM pada media 1 sebesar 6%, sedangkan pada media 2 sebesar 10%. Isu lain-lain pada media 1 sebesar 5% dan pada media 2 sebesar 10%. Gambaran rincian isu keberagaman yang diberitakan di media konvergen dirangkum dalam grafik 1.

### 3. Memori Kolektif Jurnalis di Wilayah Pasca Konflik

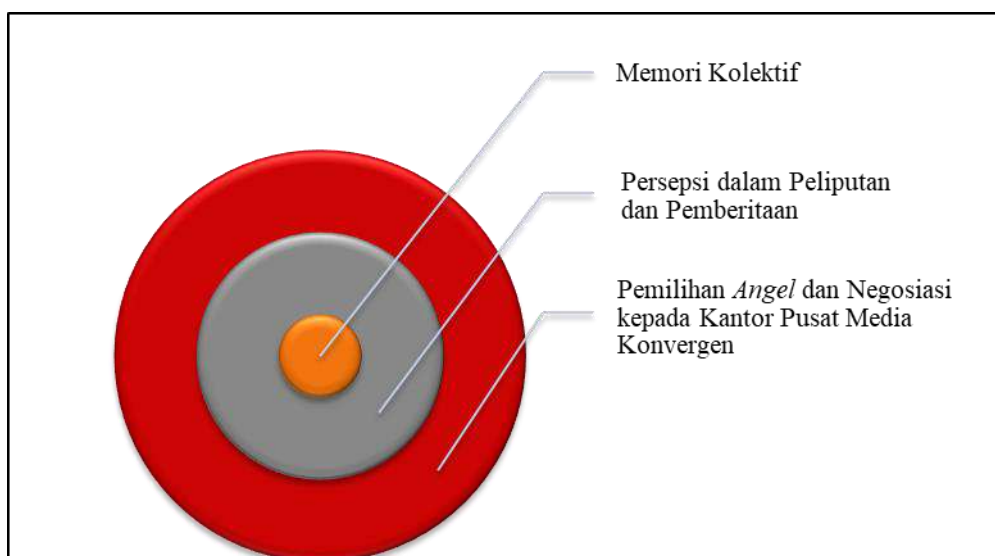
Dalam melakukan tugas pemberitaan, para jurnalis membawa serta memori kolektif traumatis, berupa trauma dari konflik yang dialami masyarakat lokal di masa lampau. Sejalan dengan pemikiran Simko (2019) memori kolektif oleh para

kontributor media konvergen direkonstruksi di masa sekarang, karena ada kebutuhan untuk menjaga perdamaian dan mencegah teradinya kembali konflik di masa lalu. Memori kolektif di sini merupakan prinsip utama yang mendasari kerja kontributor media konvergen dalam memberitakan keberagaman.

Memori kolektif yang dimiliki bersama para jurnalis kontributor berita, menjadi dasar di dalam proses seleksi peristiwa yang akan diberitakan, dan cara memberitakannya. Dalam hal ini terlihat bahwa memori kolektif merupakan ingatan-ingatan dan mekanisme persepsi akan apa yang dapat diberitakan dan bagaimana memberitakannya. Dalam hal ini, memori kolektif menjadi acuan untuk memahami tentang dunia (Golden, 2010), memahami informasi yang aman dan yang bersiko bagi kedamaian masyarakat lokal. Memori kolektif pada tataran ini merupakan berada di antara prinsip utama dan dunia kerja kontributor media konvergen di dalam memberitakan isu keberagaman.

Ekspresi memori kolektif yang paling dapat terlihat adalah ketika para kontributor ini memilih sudut pandang pemberitaan isu keberagaman, membangun narasi di dalam pemberitaannya, serta melakukan negosiasi dengan redaksi media konvergen di kantor pusat.

Ketiga lapisan memori kolektif di dalam kerja kontributor media konvergen dari wilayah pasca konflik ketika melakukan pemberitaan keberagaman dapat dirangkum di dalam gambar 2 di bawah ini:



Gambar 1. Model Lapisan Memori Kolektif dalam Pemberitaan Keberagaman Oleh Kontributor Media Konvergen di Wilayah Pasca Konflik.

#### **4. Ketimpangan Relasi Jurnalis Daerah dengan Redaksi di Jakarta**

Salah satu hal yang menjadi tantangan dalam pemberitaan keberagaman adalah ketimpangan relasi kerja antara para kontributor di wilayah pasca konflik dengan redaksi di Jakarta. Kondisi ini terjadi sebagai akibat hubungan kerja yang tidak setara antara kontributor dengan redaksi di Jakarta. Kontributor hanya jurnalis lepas yang tidak memiliki ikatan kerja selain kontrak jual beli berita yang kini disebut kontrak mitra. Mereka hanya mendapatkan honor dari hasil berita yang ditayangkan. Sementara, jika berita tidak ditayangkan, maka para kontributor akan gigit jari. Jumlah honor per berita tayang rata-rata di tiap media sekitar Rp 300 ribu.

Kontrak honor per tayang semacam itu, tentu tak sehat, karena dapat memancing para kontributor mengirimkan berita yang sesuai selera Jakarta. Artinya, agenda setting Jakarta menjadi panglima. Posisi demikian tentu rawan dalam menjaga perdamaian di wilayah pasca konflik. Keinginan redaksi di Jakarta, bisa jadi menyulut konflik dan menyebabkan perdamaian terganggu. Namun dari pengakuan para kontributor yang menjadi narasumber penelitian ini, meski selera Jakarta menjadi acuan, mereka masih berupaya melakukan seleksi, antara lain melakukan dialog dan memberikan saran ketika isu yang hendak diliput memiliki potensi konflik. Jika mereka merasakan peristiwa yang akan diliput mengandung kerawanan konflik sosial, mereka bernegosiasi agar tidak perlu meliputnya. Atau mereka lebih dulu akan meminta rekomendasi dari aparat keamanan setempat, apakah peristiwa tersebut “aman” untuk diberitakan.

Memilih untuk tidak memberitakan tentu berakibat hilangnya pendapatan. Padahal untuk mendapatkan honor sehari-hari, bukan perkara mudah karena mereka harus bersaing dengan berita-berita yang dikirim para kontributor dari lokasi lain. Ketidaksetaraan hubungan kerja ini menempatkan kontributor pada posisi tawar yang lemah.

#### **5. Relasi Jurnalis dan Masyarakat di Wilayah Pasca Konflik**

Pasca konflik agama, para jurnalis bekerja ekstra hati-hati. Di wilayah Ambon, misalnya. Masyarakat Ambon menjadi lebih sensitif terhadap pemberitaan terutama menyangkut isu-isu yang bisa memperuncing kerawanan sosial. Bagi para kontributor, mengambil fakta dari keterangan aparat keamanan, tak serta merta



menjamin keamanan mereka. Jika fakta yang diberikan aparat keamanan tak sesuai dengan fakta yang diyakini masyarakat, maka para kontributor bisa menjadi target kemarahan masyarakat. Sebagai kontributor dari media nasional, mereka dengan mudah dikenali oleh masyarakat kota Ambon. Protes terhadap pemberitaan bisa dilakukan secara langsung kepada mereka.

Berkaca dari peristiwa semacam itu, para jurnalis berpandangan bahwa masyarakat Ambon sangat memperhatikan berita hasil liputan mereka. Oleh sebab itu, sikap yang diambil para jurnalis adalah selektif dalam memilih liputan, dan berhati-hati dalam mengemas berita. Karena berita hasil liputan mereka dapat mengundang protes dari masyarakat jika dinilai tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

## **6. Dampak Luas Media Sosial**

Harus diakui pengguna media sosial pada saat ini jumlahnya lebih besar daripada khalayak media konvensional. Hal ini tidak dapat dilepaskan dengan penetrasi internet yang kian besar di masyarakat. Hasil survey Hotsuite We are social 2020 menunjukkan jumlah pengguna internet di Indonesia sebanyak 175,4 juta orang atau 64% dari total penduduk Indonesia. Sementara jumlah pengguna media sosial mencapai 160 juta orang atau 59% dari total populasi Indonesia. Maka tak salah jika konten media sosial lebih kuat dalam mempengaruhi opini publik. Hal tersebut diakui oleh para jurnalis yang menjadi narasumber penelitian ini, bahwa masyarakat kini beralih kepada media sosial daripada media konvensional dalam mencari informasi.

Jika media konvensional berhati-hati ketika memberitakan peristiwa konflik, sebaliknya media sosial begitu bebas menyiarkan konten berpotensi memicu konflik atau memperluas eskalasi konflik. Para jurnalis menyadari perlunya regulasi di media sosial untuk membatasi konten-konten yang berbahaya. Salah satu yang menjadi sorotan adalah regulasi di bidang penyiaran. Pada industri penyiaran telah memiliki aturan ketat berupa Undang-undang penyiaran, Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P SPS) dan Kode Etik Jurnalistik. Sementara penyiaran pada platform berbentuk OTT (over the top) sama sekali tidak ada. Di beberapa negara seperti UK, Cina, Korea Selatan mengatur konten OTT (Kemenkominfo, 2017). Sementara di Indonesia belum terdapat regulasi OTT penyiaran berbasis

aplikasi maupun web bagi penyelenggara penyiaran. P3SPS tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) belum mengakomodasi konten pada OTT penyiaran atau media konvergen. Peraturan Menkominfo RI No. 32 Tahun 2013 lebih mengatur teknis penyelenggaraan penyiaran, belum menyentuh pada konten program.

## **7. Rekomendasi**

Berdasarkan berbagai temuan dan analisa hasil penelitian di atas, tim peneliti memberikan sejumlah rekomendasi.

1. Hubungan antara kontributor di daerah dengan redaksi di Jakarta dapat dikembangkan lebih baik lagi. Sehingga terjadi pemahaman bersama dalam menjalankan jurnalisme damai terutama di wilayah pasca konflik. Hubungan kerja antara kontributor dan redaksi di Jakarta diharapkan tidak lagi didasarkan atas hubungan majikan dengan pekerja lepas, dimana kontributor hanya dibayar berdasarkan honor berita. Tetapi diubah kontributor menjadi wartawan tetap dari organisasi medianya. Dengan begitu kontributor memiliki posisi tawar lebih kuat di hadapan redaksi Jakarta. Hubungan kerja yang terjadi selama ini tidak berimbang. Terkesan redaksi pusat Jakarta melakukan komodifikasi pekerja jurnalis di daerah. Dengan cara ini diharapkan terjadi pemahaman yang baik antara redaksi di Jakarta dengan jurnalis di daerah soal pemberitaan keberagaman dan jurnalisme damai.
2. Perlunya kesatuan pandangan antara kontributor dengan redaksi di Jakarta soal berita keberagaman. Selama ini penayangan berita lebih dititikberatkan pada kepentingan mendapat perhatian jumlah penonton yang besar. Hal itu akan tercermin dari perolehan *rating* dan *share*. Sayangnya berita dengan topik keberagaman tidak selalu dapat menarik perhatian penonton. Kalau pun menarik kerap kali adalah berita yang mengandung konflik antara etnik atau agama. Sudah pasti model berita tersebut dihindari oleh jurnalis daerah. Hendaknya terdapat kesadaran yang bertumpu pada idealisme redaksi untuk memberikan porsi pemberitaan bertopik keberagaman, terutama yang dapat membangun hubungan yang harmonis di antara berbagai perbedaan di Indonesia.

3. Mendorong peran organisasi profesi jurnalis, antara lain Dewan Pers dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia memberikan panduan bagi para jurnalis dalam memberitakan keberagaman. Dengan adanya panduan tersebut diharapkan kekhawatiran jurnalis pada bahwa berita keberagaman terutama bernuasa konflik akan memperkeruh situasi akan hilang. Dalam diskusi bersama dengan Dewan Pers dan IJTI, diakui memang belum ada panduan khusus mengenai peliputan dan pemberitaan keberagaman. Selama ini yang dilakukan oleh Dewan Pers dan IJTI untuk mengantisipasi berita konflik hanya bersifat *ad hoc* berupa imbauan melalui grup WA. Dengan adanya panduan diharapkan jurnalis pusat dan daerah memiliki kesamaan persepsi dalam memandang berita keberagaman.

## Daftar Pustaka

- Hartanti, Lisa Esti Puji. (2018). Komunikasi orang muda di sosial media sebagai influencer. *Jurnal Wacana*. 17 (2), 143-151
- Golden, C. (2010). Frayed At The Edges: Collective Memory And History On The Borders Of Classic Maya Polities. *Ancient Mesoamerica*, 373-384
- Juditha, Christiany. (2018). Interaksi komunikasi hoax di media sosial serta antisipasinya. *Jurnal Pekommas*. 3(1), 31-44
- Junaidi, Ahmad. (2017). Media dan keberagaman: Analisis pemberitaan media daring seputar pemilihan kepala daerah DKI Jakarta. *Jurnal Muara*. 1(1), 329-337
- Loisa, Riris; Susanto, Eko Hary; Junaidi, Ahmad; Loekman, Felicia. (2019). Media siber, aparat dan pemberitaan Keberagaman. *Jurnal Aspikom*. 3(6), 1243-1253.
- McQuail, Dennis. (2011). *Teori komunikasi massa*. edisi ke-6 Jakarta: Salemba Humanika.
- Septanto, Henri. (2018). Pengaruh hoax dan ujaran kebencian sebuah cyber crime dengan teknologi sederhana di kehidupan sosial masyarakat. *Jurnal Kalbiscentia*, 5(2), 157-162
- Simko, Christina. (2019). Collective Memory. *obo in Sociology*.



**Humanis**  
**Entrepreneurship**  
**Profesionalisme**  
**Integritas**

Fakultas Ilmu Komunikasi  
Universitas Tarumanagara  
Jl. S. Parman No. 1 Jakarta Barat  
Telpon 021-56960586  
Fax 021-56960584  
Email [fikom@untar.ac.id](mailto:fikom@untar.ac.id)